

DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>

P-ISSN: 2715-5218

E-ISSN: 3026-5622

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie>

Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Fakultas Perlindungan Masyarakat

Institut Pemerintahan Dalam Negeri



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Ronaldo Putra Pratama Sinurat

Politeknik Keuangan Negara STAN, Jl. Bintaro Utama 5, Tangerang Selatan, 15222, Banten

Email: ronaldosinurat7@gmail.com

Received: 20-08-2023; Accepted: 14-11-2023; Published Online: 19-12-2023

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan sulit yang melanda bangsa ini. Ketika masyarakat miskin, perekonomian dan kualitas hidup negara akan menderita. Penting untuk mengkaji penyebab kemiskinan agar dapat memeranginya secara efektif. Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, dan Pengangguran dikaji kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia. Model regresi linier berganda Ordinary Least Squares (OLS) digunakan dalam penelitian kuantitatif. Korelasi antara kemiskinan, indeks pembangunan manusia, inflasi, dan pengangguran di Indonesia akan dihitung. Tingkat kemiskinan di Indonesia terbukti dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, dan pengangguran sekaligus. Indeks Pembangunan Manusia terbukti memiliki hubungan negatif dan signifikan secara statistik dengan kemiskinan. Sementara itu, inflasi dan pengangguran tidak mempunyai dampak yang besar. Penelitian ini akan memberikan landasan bagi penerapan kebijakan yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci: IPM; Inflasi; Regresi Linier Berganda; Kemiskinan; Pengangguran

ABSTRACT

Poverty is a difficult issue that plagues the nation. When people are poor, both the economy and the quality of life in the nation suffer. It is important to examine the causes of poverty in order to effectively combat it. The Human Development Index, Inflation, and Unemployment are examined as they relate to poverty in Indonesia. The Ordinary Least Squares (OLS) model of multiple linear regression is used in quantitative research. The correlation between poverty, human development index, inflation, and unemployment in Indonesia will be calculated. It has been shown that the poverty rate in Indonesia is affected by the Human Development Index (HDI), inflation, and unemployment all at once. The Human Development Index was shown to have a negative and statistically significant relationship with poverty. Meanwhile, inflation and joblessness have little to no impact. This research will provide the foundation for implementing policies that will help alleviate poverty in Indonesia.

Keywords: HDI; Inflation; Multiple Linear Regression; Poverty; Unemployment

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah tujuan dari suatu negara, dimana negara tersebut semakin maju ketika ada peningkatan pada pembangunannya (Zuhdiyaty & Kaluge, 2019). Menurut Fahrudin (2014), kesejahteraan sosial merupakan kondisi dimana seseorang mampu melengkapi segala keperluan dan mampu melakukan relasi positif dengan lingkungan sekitar. Kesejahteraan sosial dapat ditinjau dari aspek-aspek yang relevan seperti pendapatan yang cukup, pendidikan, dan kesehatan. Kesejahteraan merupakan keadaan dimana seseorang merasa aman, makmur, dan bebas dari berbagai ancaman masalah ataupun kesulitan (Adi, 2015). Ancaman masalah ini mencakup dari berbagai aspek yaitu masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan masalah makanan. Kesejahteraan sosial sangat beririsan dengan kondisi perekonomian masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan sosial adalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan topik inti yang selalu menjadi bahan pembicaraan negara dunia. Penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya akan menciptakan kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir sebuah negara. Menjadi miskin berarti pendapatan seseorang tidak cukup untuk menutupi pengeluaran pokok, sehingga

membuat hidup menjadi sebuah perjuangan yang tiada henti (Suryawati, 2004). Menurut Christianto (2013), tingkat kemiskinan suatu negara atau daerah merupakan indikator yang baik mengenai taraf hidup warganya. Kemiskinan merupakan permasalahan serius di Indonesia yang masih berada pada jalur pembangunan ekonomi. Masih terdapat 24% dari 240 juta penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, menurut tingkat kemiskinan yang didefinisikan sebagai mereka yang memiliki pendapatan tahunan kurang dari \$1 (Pratama, 2014).

Seseorang atau keluarga dianggap hidup dalam kemiskinan jika tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kebutuhan dasar lainnya. Mereka yang berpenghasilan kurang dari jumlah tertentu, yang disebut garis kemiskinan, dianggap miskin (BPS, 2022). Di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, kemiskinan merupakan masalah besar karena hal ini memicu kemiskinan, yang pada gilirannya memicu sejumlah tantangan lainnya (Fadila & Marwan, 2020). Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah dua cara untuk mengklasifikasikan tingkat kesulitan ekonomi yang berbeda. Menurut definisi apapun, kemiskinan absolut terjadi ketika sebagian besar penduduk tidak memiliki akses terhadap kebutuhan paling mendasar

seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sedangkan kemiskinan relatif disebabkan oleh ketidakseimbangan ekonomi yang berkontribusi terhadap kesenjangan (Todaro, 2011).

Selama periode sembilan tahun yang berlangsung dari tahun 2012 hingga 2021, teramati adanya penurunan signifikan dalam angka kemiskinan multidimensi di Indonesia. Angka kemiskinan multidimensi turun dari 49 persen pada tahun 2012 menjadi 14,3 persen pada tahun 2021, dengan penurunan jumlah penduduk miskin multidimensi mencapai sekitar 80 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin multidimensi yang awalnya berjumlah 120,1 juta jiwa pada tahun 2012, berkurang menjadi 38,95 juta jiwa pada tahun 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Riset dan Advokasi Kebijakan Publik The Prakarsa dalam mengukur Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) Indonesia 2012-2021 menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk miskin (JPM) di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada tahun 2021, tingkat JPM di wilayah perkotaan telah berkurang menjadi seperempat dari angka pada tahun 2012, sementara tingkat JPM di wilayah desa berkurang menjadi sepertiga dari angka pada tahun 2012 (Kompas.id, 2023).

Pendekatan Kebutuhan Dasar (BPS, 2010) menggunakan gagasan mampu

memenuhi kebutuhan esensial sebagai proksi kemiskinan. *Head Count Index* (HCI) mencerminkan jumlah dan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (*Poverty Line*); Indeks Kesenjangan Kemiskinan (*Poverty Gap Index/PGI*) atau *Poverty Depth Index* (PDI) mengukur rata-rata tingkat kesenjangan antara pengeluaran individu miskin dengan ambang batas kemiskinan; dan Indeks Keparahan Kemiskinan (PSI) atau PSI memberikan gambaran distribusi pengeluaran di kalangan masyarakat miskin (Fadila & Marwan, 2020). Kemiskinan biasanya diukur dengan menggunakan sejumlah indikator yang berbeda, termasuk namun tidak terbatas pada: tingkat pendapatan atau upah, pola konsumsi, angka kematian anak, angka vaksinasi, angka malnutrisi anak, angka kesuburan, angka kematian ibu, angka harapan hidup saat lahir, dan tenaga kerja. memaksa partisipasi. Pendaftaran sekolah dasar, porsi anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ketersediaan pangan (dalam hal kalori/protein), akses terhadap air bersih, laju pertumbuhan penduduk, kondisi pendidikan di suatu negara secara keseluruhan, urbanisasi tarif, pendapatan tahunan rata-rata, dan distribusi pendapatan semuanya merupakan faktor (Adisasmita, 2005).

Pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses terhadap layanan, geografi, dan lingkungan merupakan aspek-aspek yang saling berhubungan dan berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan secara keseluruhan di suatu wilayah. Misalnya, individu dengan tingkat pendidikan rendah mungkin tidak memiliki keterampilan atau kompetensi yang memadai, sehingga sulit bersaing di pasar tenaga kerja. Pendapatan individu ini akan sangat tergantung pada jenis pekerjaan yang dapat mereka akses. Kesejahteraan seseorang dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar berhubungan langsung dengan pendapatannya, dan gaji yang lebih rendah sering dikaitkan dengan kualitas pekerjaan yang lebih buruk. Melibatkan masyarakat secara keseluruhan sangat penting untuk menurunkan angka kemiskinan. Pendidikan dan pelatihan yang lebih baik merupakan contoh pengembangan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan standar hidup dengan menjadikan masyarakat lebih siap kerja (Fadila & Marwan, 2020).

Beragam penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor ataupun indikator-indikator penyebab kemiskinan. Penelitian yang dilakukan Refika Atalay (2014), menyelidiki peran pendidikan dan IPM dalam membentuk ketimpangan pendapatan. Penelitian

Suripto dan Subayil (2020) mengamati bagaimana faktor-faktor seperti pendidikan, pertumbuhan PDB, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia (IPM) mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syaifullah & Nazaruddin Malik (2017), meneliti tentang pengaruh IPM dan produk domestik bruto (PDB) terhadap kemiskinan di ASEAN.

Penulis mampu mengkaji penyebab kemiskinan karena penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi ini melanjutkan studi sebelumnya dengan mengkaji bagaimana IPM, inflasi, dan pengangguran berhubungan dengan kemiskinan. Analisis terhadap unsur-unsur yang berkontribusi terhadap kemiskinan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperbaiki strategi pengentasan kemiskinan. Dalam studi ini, kita akan mengkaji bagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, dan tingkat pengangguran di Indonesia mempengaruhi tingkat kemiskinan. Selanjutnya, melalui analisis ini diharapkan strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia akan maksimal dan efisien dilakukan

TINJAUAN TEORITIS

Kemiskinan

Menurut BPS (2016), kemiskinan adalah keadaan tidak mampu, secara finansial atau lainnya, untuk memenuhi

kebutuhan dasar fisik dan nutrisi seseorang. Kemiskinan merupakan masalah inti dari sebuah perekonomian negara. Penelitian yang dilakukan oleh Yusnuri & Abubakar (2023) mengklaim bahwa pengentasan kemiskinan di Indonesia akan mempunyai dampak yang besar dan menguntungkan terhadap PDB negara tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia adalah metrik menyeluruh yang tidak hanya mempertimbangkan PDB namun juga tingkat pendidikan, kesehatan, dan umur panjang (Yakunina RP, Bychkov GA, 2015). Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa IPM terdiri dari tiga komponen, yaitu angka harapan hidup yang panjang dan sehat, tingkat pendidikan yang tinggi, dan kualitas hidup yang nyaman.

Umur panjang dalam kesehatan yang baik adalah kriteria pertama. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan praktik yang lebih sehat. Menurut Soekidjo Notoadmojo (1993: 62), gaya hidup sehat adalah reaksi seseorang (atau suatu organisme) terhadap berbagai rangsangan yang berkaitan dengan pola makannya, kebersihan pribadinya, keadaan tempat tinggalnya, sikapnya terhadap sakit dan penyakit, serta perilakunya. kemampuan untuk mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang baik. Pengetahuan atau pendidikan menjadi

faktor kedua. Pendidikan adalah penanaman lingkungan belajar yang kondusif dan suatu proses yang membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang penting untuk keberhasilan individu dan kolektif dalam hidup (*UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003*). Dimensi ketiga yaitu standar hidup layak. Standar hidup layak merupakan keadaan dimana seseorang dapat memperoleh kebutuhan dasar dari dirinya sendiri.

Dimensi dari IPM ini berkaitan tentang kualitas sumber daya manusia (SDM). Di Inggris, layanan kesehatan telah menjadi komponen utama sumber daya manusia di negara tersebut selama lebih dari dua abad (Hafner & Mayer-Foulkes).

Inflasi

Inflasi merupakan keadaan yang berkaitan langsung dengan keadaan perekonomian suatu regional bahkan dunia. Keadaan perekonomian ini memberikan pengaruh ataupun dampak bagi tingkat perekonomian suatu negara. Menurut Boediono (1995), *The widespread and persistent rise in prices over time is what economists call inflation*. Adanya kenaikan harga ini akan menghambat konsumsi masyarakat dan tentu akan mempengaruhi tingkat perekonomian. Pernyataan Boediono ini kembali

diperbaharui oleh dirinya. Boediono (2001:161) mengartikan inflasi sebagai kenaikan harga yang luas dan terus-menerus. Peningkatan pada harga suatu komoditas tidak dapat langsung disebut sebagai inflasi. Peningkatan harga komoditas akan disebut sebagai inflasi apabila peningkatan harga tersebut melebar dan memengaruhi komoditas ataupun aspek lain. Adanya kenaikan harga ini akan menghambat konsumsi masyarakat dan tentu akan mempengaruhi tingkat perekonomian.

Pengangguran

Tingkat pengangguran merupakan indikator ekonomi utama dalam situasi yang berbeda. Permasalahan pengangguran merupakan salah satu permasalahan makroekonomi yang menghambat kemajuan daerah dan menimbulkan permasalahan sosial lainnya (Yehosua, dkk, 2019). Yanuar (2009) mendefinisikan pengangguran sebagai keadaan aktif mencari tetapi tidak menerima pekerjaan. Inefisiensi ekonomi yang pada gilirannya mengakibatkan berkurangnya pendapatan pribadi merupakan dampak langsung dari perilaku sumber daya manusia yang kurang produktif.

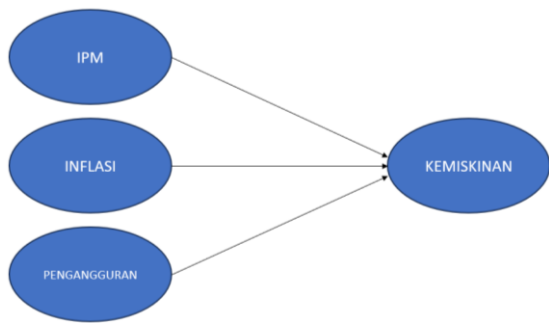
METODE PENELITIAN

Statistik deskriptif digunakan sebagai dasar metodologi penelitian ini. Saat melakukan penelitian, peneliti kuantitatif

mengumpulkan data dalam bentuk angka atau indikator numerik lainnya yang dapat dianalisis secara matematis atau statistik (Sekaran & Bougie, 2017). Data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan sumber lain digunakan untuk penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh merupakan data runtun waktu empat tahun dari Indonesia.

Kerangka sebab akibat juga digunakan dalam penelitian ini. Hubungan sebab-akibat, seperti yang didefinisikan oleh Sugiyono (2017:37). Hubungan ini tercipta karena adanya saling keterikatan antar variabel. Oleh karena itu, dalam hubungan kausal akan ada dua variabel utama yaitu variabel yang dipengaruhi ataupun dependen dan juga variabel yang mempengaruhi ataupun variabel independen.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen atau terikat. Untuk variabel independen atau variabel bebas, peneliti menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, dan Pengangguran. Kerangka model yang disusun peneliti sebagai berikut.



Sumber: diolah penulis

Gambar 1. Model Regresi Linear

Model regresi linier multivariat digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Selain uji t digunakan juga *BLUE test* untuk normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Bentuk persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Kemiskinan} &= \alpha + \beta_1 \text{IPM} \\
 &+ \beta_2 \text{Inflasi} \\
 &+ \beta_3 \text{Pengangguran} + \varepsilon
 \end{aligned}$$

Penjelasan variabel dependen dan independen sebagai berikut :

Kemiskinan = dalam persen

IPM = dalam poin

Inflasi = dalam persen

Pengangguran = dalam persen

ε = *error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi linier berganda, langkah pertama adalah uji asumsi klasik (Ghozali, 2018). Penerapan uji asumsi klasik adalah untuk regres memastikan tidak ada kesalahan ataupun bias dalam koefisien-koefisien regresi. Dengan demikian, penelitian akan konsisten dan mempunyai estimasi yang tepat

1. Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2017:239), Uji normalitas menentukan apakah data yang diperiksa mengikuti distribusi normal.

Tabel 1 : Uji Normalitas

Variabel	Obs	Prob > z
Kemiskinan	10	0.72153
IPM	10	0.33095
Inflasi	10	0.17093
Pengangguran	10	0.65198

Pada tabel terlihat bahwa prob > z setiap variabel bernilai lebih dari 0,05 (alpha). Maka dapat kita simpulkan bahwa seluruh data berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2017:47), Ketika terjadi heteroskedastisitas dalam suatu model regresi, maka variabel-variabel tersebut mempunyai varian yang berbeda-beda.

Hasil Uji : Prob > chi2 = 0,6635

Karena hasil uji menunjukkan angka lebih dari 0,05 (alpha), maka data lolos uji heteroskedastisitas

3. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2017:71) menegaskan bahwa tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji derajat korelasi, jika ada, antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 2 : Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
IPM	1.98	0.504265
Inflasi	1.98	0.505914
Pengangguran	1.01	0.992418
Mean VIF	1,66	

Pada tabel dapat kita lihat bahwa nilai VIF sebesar 1,66 ($VIF < 10$), maka secara simultan seluruh variabel lulus uji multikolinearitas. Pada 1/VIF setiap variabel lebih dari 0,10, maka secara parsial setiap variabel lolos uji multikolinearitas.

4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016:107-108), Dengan menggunakan uji autokorelasi dengan model regresi linier, kita dapat menentukan apakah kesalahan perancu pada periode t ada hubungannya dengan kesalahan perancu pada periode t-1 atau sebelumnya.

Tabel 3 : Uji Autokorelasi

Lags	Chi2	Df	Prob > z
1	0.160	1	0.6895

Hasil uji pada tabel menunjukkan bahwa nilai prob > z lebih dari 0,05 (alpha), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi pada data penelitian.

Dengan lolosnya uji asumsi klasik, maka data penelitian ini tidak bias dan konsisten.

Hasil Uji Model

Pembentukan model dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda (Multiple Linear Regression).

$$\text{Prob} > F = 0.0040$$

$$R\text{-squared} = 0.8758$$

Table 4 : Regresi Linear Berganda

Kemiskinan	Coefficient	P> t
IPM	-0.5648039	0.003
Inflasi	-0.0502505	0.385
Pengangguran	0.1968288	0.568
Cons	49.44082	0.001

Dari hasil uji regresi berganda di atas selanjutnya akan dilakukan pemodelan matematis. Pemodelan ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Model yang dihasilkan, seperti yang ditunjukkan oleh hasil tabel regresi, adalah:

$$\begin{aligned} kemiskinan &= 49,44082 - 0,564039ipm \\ &\quad - 0,0502305inflasi \\ &\quad + 0,1968288pengangguran \\ &\quad + \varepsilon \end{aligned}$$

1. Uji F

Uji F dapat digunakan untuk memeriksa hubungan antara dua variabel. Uji signifikansi model menguji sejauh mana sekumpulan variabel independen mempengaruhi sekumpulan variabel dependen. Menurut Widarjono (2018), Uji signifikansi model ataupun uji F dapat dilakukan dengan metode *Analysis of Variance* (ANOVA).

Tahapan-tahapan melakukan Uji Signifikansi (Uji), Widarjono (2018). :

- a. Menentukan Hipotesis yang terbagi atas hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_k = 0$$

Ini artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara simultan.

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_k \neq 0$$

Ini artinya, variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara simultan

- b. Menghitung atau menentukan nilai F kritis dan F hitung.
- c. Pengambilan keputusan ataupun kesimpulan untuk menerima atau

menolak H_0 . Metode berikut dapat digunakan untuk menyelesaikan langkah ini:

Hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dapat ditolak jika F taksiran lebih besar dari F kritis (signifikansi $>$).

Namun jika F taksiran lebih kecil dari F kritis maka kita memilih menerima H_0 yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat (signifikansi).

Nilai prob $>$ F sebesar 0,0040 yang ditentukan melalui regresi linier berganda. Karena probabilitas kegagalan (F) lebih kecil dari tingkat signifikansi (α), dapat disimpulkan bahwa semua faktor penjelas mempunyai dampak besar terhadap hasil (kemiskinan).

2. Uji R-Square

Menurut Widarjono (2018), Uji Uji Koefisien determinasi (R-Squared) mengungkapkan seberapa besar pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen dapat dipertanggungjawabkan oleh variabel tersebut. Untuk mengukur kualitas regresi yang kami kembangkan, uji R-Squared juga dijalankan. Angka R-kuadrat yang disebut juga koefisien determinasi

dapat berkisar antara 0 hingga 1. Nilai R kuadrat yang tinggi menunjukkan bahwa variabel independen memberikan penjelasan yang memuaskan terhadap variabel dependen. Namun jika nilai R-squared mendekati 0 berarti variabel independen tidak cukup menjelaskan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen tidak seluruhnya dapat dijelaskan oleh faktor independen saja.

Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini menghasilkan nilai r-squared sebesar 0,8758. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kemiskinan dapat dijelaskan oleh IPM, inflasi, dan pengangguran secara independen sebesar 87,58%. Sisanya sebesar 12,42% varians disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3. Uji Parsial (Uji T)

Widarjono (2015) menyatakan bahwa uji T dapat digunakan untuk menguji potensi dampak setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan demikian jelas bahwa uji T yang disebut juga uji model parsial digunakan untuk menguji bagaimana variabel independen

dipengaruhi oleh keberadaan variabel dependen. Kumpulan data regresi tunggal dan ganda menjadi sasaran uji T. Derajat kebebasan (df) menentukan segalanya.

Tahapan-tahapan uji parsial (uji T)

a. Menentukan hipotesis yang terdiri dari hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)

b. Uji hipotesis positif satu sisi

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 > 0$$

c. Uji Hipotesis negatif satu sisi

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 < 0$$

d. Atau dapat digunakan uji dua sisi

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

e. Dalam menentukan nilai t hitung setiap variabel independen dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{\beta_1 - \beta_1^*}{Se(\beta_1)}$$

Tanda bintang (*) menunjukkan nilai pada hipotesis nol (H_0)

f. Dalam menentukan kesimpulan atau keputusan uji parsial dapat dilakukan sebagai berikut :

Hipotesis nol ditolak jika dan hanya jika nilai t yang dihitung lebih besar dari nilai t yang krusial. Hal ini menunjukkan

bahwa variabel independen memang mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Namun hipotesis nol tidak ditolak jika nilai t estimasi lebih besar dari nilai t krusial. Artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang terdeteksi terhadap variabel dependen.

Selain itu, ada beberapa pendekatan untuk menentukan hasil uji t atau uji parsial. Jika nilai probabilitas ($P > |t|$) cukup tinggi, maka hipotesis nol (H_0) dapat disimpulkan salah. Hipotesis nol (H_0) ditolak jika nilai probabilitas t lebih kecil dari nilai alpha yang telah ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen ternyata mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai estimasi probabilitas t lebih kecil dari nilai alpha, maka hipotesis nol ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel di atas, variabel IPM merupakan satu-satunya faktor independen yang berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen ($P > |t| 0,003$) dalam analisis regresi.

Pada poin analisis pembahasan akan dilakukan interpretasi dari hasil uji regresi berganda yang telah dituangkan dalam suatu model. Hasil analisis ini yang nantinya akan menjadi acuan untuk mengambil langkah yang tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia

Interpretasi Model

1. Pengaruh IPM Terhadap Kemiskinan

Koefisien IPM yang dihitung dengan uji regresi linier berganda adalah -0,5648039. Nilai ini menunjukkan hubungan IPM terhadap kemiskinan adalah negatif yang memiliki arti bahwa saat IPM mengalami kenaikan maka kemiskinan akan mengalami penurunan dan berlaku sebaliknya. Probabilitas IPM sebesar 0,003 yang merupakan kurang dari nilai alpha. Ini menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan temuan Sofilda dkk. (2013), yang menemukan bahwa IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan di kota-kota di Provinsi Papua. Hal ini didukung oleh penelitian lain; misalnya, analisis Fadila & Marwan (2020) mengenai angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat menemukan bahwa IPM mempunyai dampak yang

signifikan dan negatif secara statistik terhadap angka tersebut. Namun Syaifullah dan Malik (2017) menemukan bahwa IPM justru memberikan dampak negatif dan kecil dalam penelitian mereka. Studi Yakunina dan Bychkov (2015) menemukan bahwa IPM secara signifikan mempengaruhi kemiskinan di Rusia.

2. Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan
Koefisien inflasi sebesar $-0,0502505$ dengan probabilitas sebesar $0,385$ atau lebih dari $0,05$ (α) yang ditunjukkan melalui uji regresi linear berganda. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi dan kemiskinan tidak mempunyai hubungan yang erat. Gagasan yang menyatakan bahwa inflasi yang lebih tinggi akan menyebabkan pendapatan dan kekayaan yang lebih rendah serta konsumsi yang lebih rendah, yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan, bertentangan dengan temuan ini. Fakta bahwa tingkat inflasi seringkali lebih tinggi di negara-negara berkembang membantu menjelaskan fenomena ini. Hal ini sering dikaitkan dengan peningkatan standar hidup dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Keadaan ini menjelaskan mengapa inflasi dikaitkan dengan rendahnya pendapatan. Hal ini sejalan dengan temuan Pratama (2014) yang menunjukkan bahwa inflasi mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap

model. Inflasi mempunyai dampak yang positif dan tidak signifikan, menurut penelitian Manangkalangi dkk. (2020). Talukdar (2012) menemukan bahwa inflasi mempunyai dampak positif dan kecil, namun temuan ini bertentangan dengan temuan tersebut. Fujii (2013) menemukan bahwa di Filipina, inflasi pangan khususnya berdampak buruk pada masyarakat berpenghasilan rendah.

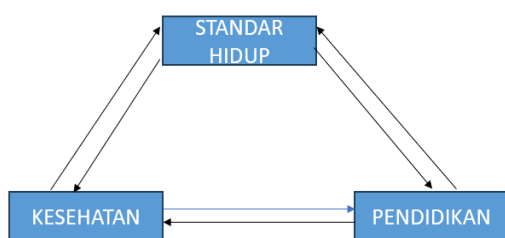
3. Pengaruh Pengangguran dengan Kemiskinan

Analisis regresi linier berganda menunjukkan koefisien pengangguran sebesar $0,1968288$ dengan tingkat signifikansi $0,568$ atau lebih dari $0,05$ (α). Bahwa pengangguran dan kemiskinan berkorelasi positif dan tidak signifikan ditunjukkan di sini. Oleh karena itu, pengangguran tidak memberikan pengaruh sangat besar terhadap perubahan kemiskinan. Penelitian Ketut dan Endrayani (2016) memberikan lebih banyak bukti mengenai hal ini. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua penduduk yang tidak memiliki pekerjaan menjadi miskin. Di sisi lain, ada orang-orang yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan namun tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena kemurahan hati orang lain. Pengangguran memiliki pengaruh yang menguntungkan dan dapat diabaikan,

menurut penelitian yang dilakukan oleh Giovanni (2018). Studi lain yang menegaskan dampak pengangguran terhadap kemiskinan yang menguntungkan dan dapat diabaikan adalah yang dilakukan oleh Suripto & Subayil (2020). Namun penelitian Fadlillah dkk. (2016) mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran di Jawa Tengah berpengaruh positif signifikan.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan, maka fokus penanggulangan kemiskinan adalah IPM. Dimensi dari IPM meliputi umur panjang dan sehat, pendidikan, standar hidup layak. Peningkatan IPM hanya akan berhasil apabila setiap aspek dimensi IPM secara simultan meningkat secara berkelanjutan. Ini disebabkan karena setiap elemen pada IPM memiliki hubungan secara timbal balik.



Sumber: diolah penulis

Gambar 2. Hubungan Antar Aspek IPM

Pertama, aspek umur panjang dan sehat (kesehatan). Berinvestasi pada kesehatan masyarakat adalah penggunaan sumber daya yang bijaksana. Produktivitas, khususnya di tempat kerja, dapat ditingkatkan dengan sumber daya manusia yang sehat. Strategi yang dapat diterapkan dalam hal meningkatkan kesehatan di Indonesia antara lain pertama, improvisasi infrastruktur kesehatan. Salah satu contohnya adalah pengandaan pos-pos kesehatan di daerah tertinggal ataupun 3T. Ini akan membuat tingkat harapan hidup anak-anak terutama bayi akan meningkat. Kedua, subsidi suplemen kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Subsidi ini merupakan subsidi barang dan bukan berupa uang tunai. Dengan adanya subsidi ini, maka diharapkan masyarakat khususnya yang menengah ke bawah akan meningkat kesehatannya. Ketiga, digitalisasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Di era yang modern ini diperlukan digitalisasi dalam mengontrol kesehatan di masyarakat agar lebih efisien untuk mengambil tindakan cepat. Namun, digitalisasi harus sejalan dengan sosialisasi kepada masyarakat karena tidak semua golongan masyarakat paham menggunakan kecanggihan IPTEK sekarang ini. Dengan strategi ini, diharapkan tingkat kesehatan

masyarakat akan meningkat yang berkelanjutan.

Kedua, aspek pendidikan pada masyarakat. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk membangun sumber daya manusia (Atalay, 2014). Berpedoman pada penelitian Muslim (2002) dengan penerapan SDGs untuk optimalisasi pendidikan di Indonesia, maka ada beberapa poin yang harus dilaksanakan antara lain pertama, penguatan akses yang terjamin untuk masuk pendidikan terutama pendidikan dasar. Kedua, perluasan serta improvisasi sarana-sarana pendidikan yang berkualitas serta aman bagi pelajar. Ketiga, improvisasi kualitas tenaga pendidik untuk mendukung proses pembelajaran. Keempat, minimalisasi diskriminasi dalam pendidikan terutama dalam hal gender, ini bertujuan agar setiap anak memperoleh hak yang sama. Kelima, penambahan pendidikan karakter untuk moral dan jalan pikiran. Salah satu strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan pedoman poin ini adalah reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan merupakan kegiatan transformasi model pendidikan agar lebih efektif dan efisien sesuai zaman. Reformasi ini meliputi, pertama pembangunan infrastruktur yang lebih merata untuk setiap daerah. Dengan adanya infrastruktur merata maka setiap anak tidak memiliki kesenjangan dalam belajar. Kedua, adanya

subsidi tepat sasaran bagi para siswa yang tidak mampu. Masalah utama dari pendidikan adalah biaya. Dengan adanya subsidi tepat sasaran diharapkan banyak individu-individu bisa memperoleh pendidikan yang lebih baik lagi. Ketiga, digitalisasi pendidikan. Digitalisasi pendidikan dimaksudkan agar anak-anak tidak hanya berfokus belajar di sekolah saja tetapi di seluruh tempat. Pelaksanaan digitalisasi ini harus sejalan dengan pembangunan infrastruktur pendidikan khususnya sambungan internet.

Ketiga, aspek standar hidup layak. Standar hidup layak akan beririsan dengan kesehatan karena ini merupakan pondasi kuat untuk memiliki kesehatan yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Woyanti (2018) menyatakan bahwa kesehatan yang dipresentasikan dalam standar hidup layak memiliki pengaruh dalam pengurangan kemiskinan. Peningkatan standar hidup layak pada masyarakat perlu dilakukan apabila ingin mengentaskan kemiskinan. Peningkatan standar hidup layak pada masyarakat dapat dimulai dari pembangunan infrastruktur sanitasi yang baik bagi masyarakat. Dengan adanya pembangunan sanitasi yang baik maka kebersihan pada lingkungan masyarakat akan terjaga. Kemudian adalah tempat hunian, diperlukan adanya pembangunan tempat hunian layak bagi masyarakat.

Dengan adanya tempat hunian yang layak maka masyarakat dapat mengembangkan potensi dirinya dengan lebih optimal.

KESIMPULAN

Kemiskinan merupakan masalah pokok yang harus diselesaikan. Kemiskinan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor penyebab kemiskinan perlu dikaji agar menjadi pedoman untuk melakukan penanggulangan kemiskinan khususnya di Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan secara statistik antara IPM dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Terdapat korelasi negatif dan dapat diabaikan dengan inflasi. Kemiskinan berkorelasi negatif dan marginal dengan pengangguran.

Berdasarkan analisis faktor penyebab kemiskinan maka perlu dilakukan penguatan pada aspek IPM. Penguatan IPM ini akan memiliki dampak untuk menurunkan bahkan menanggulangi kemiskinan. Strategi utama dalam peningkatan IPM yaitu penguatan pada sisi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dengan adanya penguatan pada IPM ini diharapkan kualitas sumber daya manusia akan meningkat dan akan menstimulus individu untuk mampu mencari penghasilan. Dengan demikian,

kemiskinan akan mengalami degradasi yang signifikan dari waktu ke waktu.

SARAN

Berdasarkan kajian dalam penelitian ini, baik masyarakat dan pemerintah sebaiknya berfokus dalam memperbaiki tingkat IPM di Indonesia. Ini karena IPM memiliki andil besar dalam tingkat kemiskinan di Indonesia. Sinergitas antar masyarakat dan pemerintah diperlukan dalam menanggulangi kemiskinan serta untuk memelihara kesejahteraan antar masyarakat yang ada di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Alhudhori, M. (2017). Pengaruh IPM, PDRB dan jumlah pengangguran terhadap penduduk miskin di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 1(1), 113-124.
- Atalay, R. (2015). The education and the human capital to get rid of the middle-income trap and to provide the economic development. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 174, 969-976.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/23>

/192/1/persentase-penduduk-
miskin-menurut-provinsi.html

- Bintang, A. B. M., & Woyanti, N. (2018). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015). *Media ekonomi dan Manajemen*, 33(1).
- Demak, S. N. K., Masinambow, V. A., & Londa, A. T. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan Belanja Modal Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01).
- Endrayani, N. K. E., & Dewi, M. H. U. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(1), 63-88.
- Fadila, R., & Marwan, M. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. *Jurnal Ecogen*, 3(1), 120-133.
- Fadlillah, N., Dewi, A. S., & Sukiman, S. (2016). Analisis pengaruh pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, IPM dan pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2009-2013. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 11(1).
- Fujii, T. (2013). Impact of food inflation on poverty in the Philippines. *Food policy*, 39, 13-27.
- Feriyanto, N., El Aiyubbi, D., & Nurdany, A. (2020). The impact of unemployment, minimum wage, and real gross regional domestic product on poverty reduction in provinces of Indonesia. *Asian Economic and Financial Review*, 10(10), 1088.
- Giovanni, R. (2018). Analisis pengaruh PDRB, pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2009-2016. *Economics Development analysis journal*, 7(1), 23-31.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). Analisis multivariat dan ekonometrika: teori, konsep, dan aplikasi dengan eviiew 10.
- Hardinandar, F. (2019). Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten di Provinsi

- Papua). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 1-12.
- Manangkalangi, L. K., Masinambow, V. A., & Tumilaar, R. L. (2020). Analisis Pengaruh Pdrb Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Tengah (2000-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03).
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia.
- Quy, N. H. (2016). Relationship between economic growth, unemployment and poverty: Analysis at provincial level in Vietnam. *International Journal of Economics and Finance*, 8(12), 113-119.
- Suripto, S., & Subayil, L. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di di Yogyakarta priode 2010-2017. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 127-143.
- Syaifullah, A., & Malik, N. (2017). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan produk domestik bruto terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN-4 (Studi pada 4 negara ASEAN). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 107-119.
- Talukdar, S. R. (2012). *The effect of inflation on poverty in developing countries: A panel data analysis* (Doctoral dissertation)
- Yakunina, R. P., & Bychkov, G. A. (2015). Correlation analysis of the components of the human development index across countries. *Procedia Economics and Finance*, 24, 766-771.
- Yusnuri, R. A., & Abubakar, J. (2023). Analysis Of Human Development Index, Unemployment And Poverty On Economic Growth In Indonesia.